

## **STRATEGI MENENTUKAN FUNGSI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM**

Yahya Zahid Ismail  
Dosen STIT Sunan Giri Trenggalek  
Email: yahyazahid08@gmail.com

### *Abstract*

*In order to achieve the goals in the field of religion and education which are the tasks of the Ministry of Religion, the Ministry of Religion has set strategic targets to be achieved within the next five years. There are at least two mission burdens that must be carried out by Islamic educational institutions, especially Islamic universities (High Schools, Institutes, and Universities), namely academic missions and religious missions. Islamic religious universities must be able to create a bridge that connects the two missions. Mujamil Qomar said that there are at least three options to solve this problem: (1) PTKI must always strengthen its academic (scientific) mission and continue to carry on its mission of da'wah (religious); (2) PTKI carries out research development, scientific development, change, renewal, and so on with an academic spirit, while in practicing the scientific results that have been owned and achieved using the spirit of da'wah; (3) PTKI tries to develop da'wah (religious) by using scientific patterns. This can be expressed by developing da'wah management of da'wah leadership, da'wah methods, da'wah approaches, da'wah by word of mouth (da'wah bi al-lisan), da'wah by action (da'wah bi al-hal), da'wah by writing (da'wah bi al-hal). 'wah bi al-kitabah) and da'wah through entertainment (da'wah bi at-tasliyah). The function of Islamic Education Institutions includes 2 things, namely: education and development and change. The strategy for determining the function of Islamic educational institutions includes 2 things, namely: academic missions and religious missions; and improving quality and competitiveness*

*Keywords: Strategy, Determining Functions, Islamic Education Institutions*

### Abstrak

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Paling tidak ada dua beban misi yang harus dipikul atau diemban oleh lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi Islam (Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas), yaitu misi akademik dan misi keagamaan. Perguruan tinggi agama Islam harus mampu menciptakan jembatan yang menghubungkan kedua misi tersebut. Mujamil Qomar mengatakan, paling tidak terdapat tiga pilihan untuk memecahkan masalah ini: (1) PTKI harus senantiasa memantapkan misi akademis (keilmuan) dan tetap membonceng misi dakwah (keagamaan); (2) PTKI melakukan pengembangan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, perubahan, pembaruan, dan sebagainya dengan semangat akademis, sedangkan dalam mengamalkan hasil-hasil keilmuan yang telah dimiliki dan dicapai dengan menggunakan semangat dakwah; (3) PTKI berusaha mengembangkan dakwah (keagamaan) dengan menggunakan pola-pola keilmuan. Hal ini dapat di ekspresikan dengan cara mengembangkan manajemen dakwah kepemimpinan dakwah, metode dakwah, pendekatan dakwah, dakwah dengan lisan (*da'wah bi al-lisan*), dakwah dengan perbuatan (*da'wah bi al-hal*), dakwah dengan tulisan (*da'wah bi al-kitabah*) dan dakwah melalui hiburan (*da'wah bi at-tasliyah*). Fungsi Kelembagaan Pendidikan Islam, meliputi 2 hal, yaitu: pendidikan dan pengembangan dan perubahan. Adapun Strategi menentukan fungsi kelembagaan pendidikan Islam, meliputi 2 hal, yaitu: misi akademik dan misi keagamaan; dan peningkatan mutu dan daya saing

Kata kunci: Strategi, Menentukan Fungsi, Kelembagaan Pendidikan Islam

### Pendahuluan

Inti dari cita-cita pendidikan, terutama pendidikan agama Islam adalah terbentuknya manusia yang beriman, cerdas, kreatif, dan memiliki keluhuran budi. Tugas utama pendidikan adalah upaya secara sadar untuk mengantarkan manusia pada cita-cita tersebut, dan pendidikan Islam juga memiliki fungsi mengarahkan kehidupan dan keberagamaan manusia kearah

kehidupan Islami yang ideal.<sup>1</sup> Jika upaya pendidikan mengalami kegagalan dalam mengantarkan manusia kearah cita-cita manusiawi yang bersandar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, maka yang akan terjadi adalah tumbuhnya perilaku-prilaku negatif.

Berbagai perilaku-prilaku destruktif tersebut, yang sering muncul dinegara Indonesia, merupakan akibat dari belum munculnya pribadi-pribadi cerdas, kreatif, dan berbudi luhur. Orang yang cerdas selalu menggunakan daya nalar manusiawinya secara benar dan obyektif dalam melihat realitas sosial. Orang yang kreatif, mempunyai pilihan-pilihan dalam memenuhi dan menjawab persoalan-persoalan hidupnya. Orang yang 'Arif (sekar kata dengan 'Urf, tradisi) dan luhur budi (dalam bahasa agamanya *al-Akhlak al-Karim*), mampu menentukan pilihan yang paling tepat dan selalu menolak cara-cara kekerasan dalam mensikapi berbagai dilema kehidupan. Kecerdasan dan kearifan yang bersumber pada daya kritis atas nilai diri dan sosial, sehingga mampu memberikan sinaran yang selalu tumbuh terhadap kepedulian pada sesama.<sup>2</sup>

Dalam konteks inilah, pendidikan agama Islam sebagai salah satu media penyadaran umat, dihadapkan pada problem bagaimana mengembangkan sebuah pola pendidikan yang transformatif, sebuah pola pendidikan yang mampu memberikan pemahaman dan transformasi pembelajaran yang tidak saja bertumpu pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga transfer nilai. Pendidikan transformatif merupakan pola pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (*teacher centered*), tetapi lebih pada pola pembelajaran yang memberikan "ruang" bagi peserta didik untuk lebih mengaktualisasikan potensi akademisnya secara maksimal.

Hampir setiap orang atau organisasi memiliki perencanaan. Apakah perencanaan tersebut menyangkut kehidupan pribadinya, maupun yang terkait dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Perencanaan merupakan fungsi pertama dan yang utama dalam kegiatan manajemen. Oleh karenanya berbagai faktor yang terkait dengan perencanaan perlu untuk dipahami

---

<sup>1</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan Dakwah* (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), hlm. 237.

<sup>2</sup> Abdul Munir Mulkhan, Humanisasi Pendidikan Islam, *Jurnal Tashwirul Afkar*, No 11, tahun 2000, hlm. 11.

sebelum kegiatan dijalankan. Hal ini disebabkan karena perencanaan akan menentukan ke mana organisasi tersebut akan diarahkan. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak bisa diimplementasikan, sehingga tujuan organisasi tidak terwujud.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.<sup>3</sup> Mulai dari urusan terkecil seperti mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur urusan sebuah negara semua itu diperlukan pengaturan yang baik, tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif. Pendidikan Agama Islam dengan berbagai jalur, jenjang, dan bentuk yang ada seperti pada jalur pendidikan formal ada jenjang pendidikan dasar yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), jenjang pendidikan menengah ada yang berbentuk Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan pada jenjang pendidikan tinggi terdapat begitu banyak Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) dengan berbagai bentuknya ada yang berbentuk Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas. Pada jalur pendidikan non formal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Majelis Ta'lim, Pesantren dan Madrasah Diniyah. Jalur pendidikan informal seperti pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Kesemuanya itu perlu pengelolaan atau manajemen yang sebaik-baiknya, sebab jika tidak bukan hanya gambaran negatif tentang pendidikan Islam yang ada pada masyarakat, akan tetap melekat dan sulit

---

<sup>3</sup> Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 2003), hlm. 1.

dihilangkan bahkan mungkin Pendidikan Islam yang baik itu akan hancur oleh kebathilan yang dikelola dan tersusun rapi yang berada di sekelilingnya, sebagaimana dikemukakan Ali bin Abi Thalib: “*kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dihancurkan oleh kebathilan yang tersusun rapi*”. Oleh sebab itu, Dalam mengembangkan strategi dibutuhkan perencanaan, pandangan umum mengatakan bahwa strategi dikembangkan dan diterapkan dengan cara linear, dan bahwa strategi yang diinginkan oleh organisasi akan diterapkan secara keseluruhan untuk menjadi kenyataan sebagai strategi yang aktual. Akan tetapi tidak setiap strategi yang diinginkan selalu menjadi kenyataan. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran keadaan lingkungan yang tidak diharapkan, sehingga masalah-masalah dalam pencapaian yang tidak terlihat sebelumnya, sering muncul dan membatasi efisiensi dan formulasi dari strategi yang telah direncanakan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa organisasi tersebut menjadi tidak memiliki strategi sama sekali. Dalam kaitan ini, strategi yang dikejar organisasi tidak perlu didukung oleh organisasi atau tokoh-tokoh seniornya. Tetapi harus ditempatkan pada konteks tujuan yang dikejar oleh organisasi. Dengan demikian strategi itu dapat berkembang secara berkesinambungan, mudah menyesuaikan diri dan sekaligus meningkatkan diri.

Buku Strategi Pendidikan Islam karya Mujamil Qomar merupakan buku yang mengurai dan menawarkan alternatif solusi terhadap tiga problem terbesar yang kerap dihadapi oleh pendidikan Islam, antara lain: *pertama*, kurikulum yang belum memperlihatkan arah yang jelas dan orientasi arah ke depan yang prospektif, dan walaupun baik dan menjanjikan, kurikulum yang di buat sering kali tidak disesuaikan dengan kemestian operasionalitas, efisiensi, dan efektivitas sehingga dirasa memberatkan para pelajar; *kedua*, fasilitas dan sarana, diantara kondisi faktual yang dapat kita temukan adalah rusaknya ribuan gedung sekolah, bahkan banyak diantaranya roboh dan belum diperbaiki, serta belum adanya akses bagi warga untuk memperoleh dan menikmati sekolah; dan *ketiga*, guru yang kesejahteraannya hingga sekarang belum terjamin benar, dan kualitasnya pun masih belum memadai dan belum memenuhi arus kemajuan

yang terus berkembang.<sup>4</sup> Jika upaya pendidikan mengalami kegagalan dalam mengantarkan manusia ke arah cita-cita manusiawi yang bersandar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, maka yang akan terjadi adalah tumbuhnya perilaku-prilaku negatif. Lebih lanjut Mujamil Qomar, lewat prakata dalam bukunya mengatakan:

“... kenyataan di lapangan bahwa pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia ini dari segi kuantitatif banyak jumlahnya dan sangat bervariasi. Secara praktis, aneka ragam pendidikan Islam itu luar biasa, sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih (*overlapping*) yang menyulitkan para peneliti untuk memahaminya. Apalagi menyangkut model pendidikan Islam nonformal, justru semakin banyak dan bervariasi lagi, karena para pendirinya memiliki kebebasan dalam menentukan corak lembaga pendidikan Islam yang diasuh itu. Mereka cenderung memilih corak pendidikan Islam sesuai dengan pengalamannya ketika aktif mengikuti pendidikan maupun memilih corak pendidikan yang sesuai dengan seleranya tanpa terbebani regulasi tertentu. Sayang sekali, berbagai macam praktik pengelolaan pendidikan Islam di masyarakat belum ditindaklanjuti melalui kajian serta penulisan buku secara mendetail yang relatif mencakup berbagai dimensi manajemen pendidikan Islam tersebut. Sebenarnya secara parsial, telah ada berbagai penelitian baik pada tingkat skripsi, tesis maupun disertasi yang meneliti bagian-bagian dari dimensi-dimensi manajemen pendidikan Islam itu, seperti manajemen pendidikan pesantren maupun manajemen madrasah. Namun sepengetahuan penulis, belum ada usaha-usaha serius untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan membukukannya dalam suatu buku khusus. Buku yang telah beredar hanya mencakup kajian satu komponen atau beberapa komponen manajemen pendidikan Islam yang masih sangat parsial, dan masih jauh dari muatan komprehensif sebagaimana yang diharapkan...”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), Sampul Belakang.

<sup>5</sup> Mujamil Qomar, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2015), Prakata.

## **Pembahasan**

### **A. Fungsi Kelembagaan Pendidikan Islam**

#### **1. Pendidikan**

Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dengan masyarakat, termasuk keluarga atau rumah tangga. Pemerintah Republik Indonesia telah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan dalam usaha mencerdaskan bangsa. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea ke-4 berbunyi: "... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ...". Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (2) menegaskan bahwa: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya Ayat (4) menegaskan bahwa: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.<sup>6</sup>

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dibidang

---

<sup>6</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMARI) Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015- 2019. KMARI ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.

pendidikan, karena salah satu tujuan pembangunan bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut hendaknya terus-menerus untuk dibangun sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kesejahteraan ini dapat terwujud manakala manusia yang menjadi warga negara mempunyai tingkat kecerdasan yang memadai, untuk dapat menguasai dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Agar ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dengan kemampuan keilmuan itulah diharapkan manusia mampu menghadapi, menyelesaikan persoalan kehidupan-yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rasional dan bertanggungjawab. Hanya saja tingkat kecerdasan tersebut juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, baik nilai moral keagamaan maupun nilai moral yang telah diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Osman Bakar yaitu: *"obsesi terhadap sains dan teknologi dengan mengenyampingkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dijunjung tinggi, merupakan salah satu kemalangan besar dizaman kita ini, kemalangan itu lebih besar lagi jika obsesi tersebut menyangkut kekuasaan materi semata"*.<sup>7</sup>

Usaha pemerintah dalam membangun pelayanan pendidikan memang terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat peraturan dan perundang-undangannya. Langkah-langkah ini seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan, hal ini ditandai dengan disyahkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yang dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang. Sistem pendidikan kita secara ideal berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintahan yang desentralistik. Kebijakan yang bersifat khusus, UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang desentralistik, diarahkan oleh aturan yang ada pada kebijakan yang bersifat umum, yaitu pasal 7 UU nomor 22 tahun 1999, yang menyatakan bahwa pendidikan bukan merupakan kewenangan

---

<sup>7</sup> Osman Bakar, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S. Nasrulloh, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains* (Bandung:Pustaka Hidayah, Edisi kedua dan Revisi, 2008), hlm. 384.



yang dipusatkan. Pendidikan yang dikelola oleh kementerian Agama adalah urusan yang bersifat sentralistik, karena Kementerian Agama adalah salah satu urusan yang termasuk yang tidak diotonomikan.<sup>8</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama, maka Kementerian Agama telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki duabidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidangpendidikan.

Urusan pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan nasional. Kebijakan nasional menggambarkan adanya peran eksekutif, dilain pihak tampak juga bahwa adanya peran legislatif baik dalam pemeritahan pusat maupun pemerintahan daerah. Eksekutif menyelenggarakan urusan pemerintahan pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan. Dipihak lain legislatif membuat aturan penyelenggaraan pemerintahan antara lain melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan atau control terhadap program pembangunan yang dilaksanakan eksekutif, menetapkan peraturan daerah dan mewakili masyarakat menyatukan aspirasinya.<sup>9</sup>

## 2. Pengembangan dan Perubahan

Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama pada standar isi, standar proses pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana

---

<sup>8</sup> Lihat UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.

<sup>9</sup> Syaiful Sagala, *Memahami Organisasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, cv, 2008), hlm. 25.

dan prasarana pendidikan. Menurut Muhaimin dalam bukunya<sup>10</sup> perubahan kurikulum 2013, merupakan tindakan perubahan yang tidak mengacu pada SNP. Pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bahwa pendidikan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, *pertama*, pendidikan agama diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan. *Kedua*, pendidikan umum berciri Islam pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non formal, serta informal. *Ketiga*, pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal, dan non formal, serta informal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara umum pesantren dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan. Hal ini terdapat pada pasal 30 ayat 1-5.<sup>11</sup>

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam pada sekolah dengan perkembangan kondisi lingkungan lokal, nasional, dan global, serta kebutuhan peserta didik. Kegiatan dalam rangka pengembangan kurikulum adalah pembinaan atas satuan

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Model Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam Kontemporer Di Sekolah/Madrasah Dan Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2016), 2. Buku ini diterbitkan oleh UIN-MALIKI Press sebagai bagian dari bentuk penghormatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Muhaimin yang telah wafat beberapa bulan lalu, tepatnya pada Ahad, 6 Desember 2015. UIN Maliki Malang merasa kehilangan salah satu tokoh pemikir pendidikan Islam. Bentuk penghormatan itu tentu dapat diwujudkan dengan beragam bentuk. Salah satunya adalah dengan menerbitkan karya Beliau ini. Buku ini adalah kenangan akademik pemikiran terkait dengan *concern* Beliau selama ini, pendidikan Islam.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan dan menetapkan: Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab VI: Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan, bagian kesembilan Pendidikan Keagamaan pasal 30. Lihat juga penjelasan Mujamil Qomar, *Menggagas Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 68.

pendidikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam tingkat satuan pendidikan.<sup>12</sup> Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah yang sedang berlangsung belum semuanya memenuhi harapan kita sebagai umat Islam mengingat kondisi dan kendala yang dihadapi, maka diperlukan pedoman dan pegangan dalam membina pendidikan agama Islam. Ini semua mengacu pada usaha strategis pada rencana strategis kebijakan umum Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam Departemen Agama yaitu peningkatan mutu khusus mengenai pendidikan agama Islam di sekolah, peningkatan mutu itu sendiri terkait dengan bagaimana kualitas hasil pembelajaran pendidikan agama Islam pada peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah. Mutu itu sendiri sebetulnya sesuatu yang memenuhi harapan-harapan kita. Artinya kalau pendidikan itu bermutu hasilnya memenuhi harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita. Kita bukan hanya sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pelaksana bersama semua pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk masyarakat, orang tua. Dalam kenyataan pendidikan agama Islam di sekolah masih banyak hal yang belum memenuhi harapan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, karena realitas yang ada betapa kita menyaksikan bagaimana kompleksitas sistem anggaran yang ada; betapa rumitnya anggaran tersebut; birokratisnya kaku dan sebagainya (sangat kompleksitas), belum lagi melibatkan berbagai instansi yang masing-masing mempertahankan egonya.<sup>13</sup>

Dunia selalu bergerak dan berubah “*Panta Rei*”. Hingga muncul ungkapan bahwa sesuatu yang pasti dan tidak berubah dalam realitas alam ini adalah perubahan itu sendiri. Dinamika perubahan ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah, dan telah menjadi sifat dasar dari segala yang ada di muka bumi, termasuk pada manusia dan pranata-pranatanya. Implikasi dari hukum ini adalah bahwa semua akan mengalami perubahan, termasuk pada dimensi-dimensi kehidupan

---

<sup>12</sup> Mujamil, *Menggagas...*, hlm. 122

<sup>13</sup> Masykur H Mansyur, Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam, *Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang*, ISSN: 1412-86676 Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012.

manusia yang lebih spesifik. Realitas perubahan ini terjadi mengiringi perjalanan dan dinamika sejarah kehidupan manusia. Secara akademis terdapat dua kategori perubahan yang terjadi; *pertama* evolusi yakni perubahan yang terjadi secara gradual atau bertahap dalam tempo yang lambat namun terus berlangsung dalam kehidupan. *Kedua* adalah revolusi yakni perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat serta dalam skala dan intensitas tinggi menyentuh pada wilayah fundamental pada pranata kehidupan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah melahirkan era yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang semakin cepat dan masif (revolusi) dalam kehidupan manusia. Diawali dari revolusi ilmu pengetahuan, kemudian melahirkan revolusi politik, revolusi industri (ekonomi) dan sosial hingga saat ini telah terjadi revolusi teknologi transportasi dan informasi yang menghantarkan zaman menuju era globalisasi yang berdampak luar biasa dalam kehidupan manusia modern<sup>14</sup>. Kehidupan era global saat ini ditandai dengan semakin massifnya penggunaan teknologi informasi yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer.<sup>15</sup> Oleh karena karakter kehidupan manusia pada era globalisasi saat ini adalah adanya interdependensi dan interkoneksi, maka revolusi yang terjadi dalam satu bidang kehidupan manusia memiliki resonansi dan daya pengaruh yang sangat besar terhadap dimensi kehidupan yang lain.

---

<sup>14</sup> Dalam bukunya tentang gelombang peradaban Alvin Toffler menjelaskan telah terjadinya tiga gelombang besar dalam sejarah peradaban manusia yakni; Masyarakat dunia kini telah bergerak memasuki tata dunia baru (*new world order*) dari tahapan perjalanan peradabannya yang oleh Alvin Toffler disebut sebagai *the Third wave*. Jika pada gelombang pertama modalitas utama yang paling menentukan adalah tanah dan pada masa ini muncul banyak tuan tanah-tuan tanah dengan kultur feodalistiknya. Kemudian pada periode kedua, masyarakat memasuki era yang *drive* oleh kekuatan kapitalis atau pemodal, maka pada era gelombang ketiga ini, kehidupan masyarakat dicirikan dengan karakter; semakin merambahnya teknologi informasi, komputerisasi, revolusi biologi dan sebagainya yang bersifat global. Lihat Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, alih bahasa Sri Koesdiyantiah, Jakarta: Pantja Simpati, 1980.

<sup>15</sup> Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi* (Jakarta: Rida Mulia, 2005), hlm.192.

Pendidikan adalah salah satu dimensi kehidupan manusia yang tidak luput dari dinamika perubahan tersebut. Dalam konteks ini, sesungguhnya pendidikan memiliki peran ganda yang harus dimainkan secara proporsional dan kontekstual. *Pertama* pendidikan memiliki peran sebagai agen perubahan (*agen of change*). Oleh karenanya maka dinamika perubahan yang terjadi dalam bidang kehidupan manusia yang lain (sosial, politik, ekonomi, ekologi, kebudayaan dan sebagainya) akan mempengaruhi terhadap proses dan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi disamping pendidikan harus juga menjalankan fungsinya yang lain (*kedua*) yakni sebagai lembaga pelestari (*concerning*) yang harus teguh dalam posisi konservasi.

Dari perspektif manajemen, lembaga pendidikan adalah lembaga yang memproduksi kompetensi akademis<sup>16</sup> dimana ilmu pengetahuan menjadi basis bagi proses produksi kompetensi tersebut. Ilmu pengetahuan baik *natural sciences* maupun *sosial sciences*, selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang sering dibahasakan dengan *Shifting Paradigm*<sup>17</sup> (Pergeseran gugusan pemikiran keilmuan). Kajian keilmuan selalu terkait dan dipengaruhi oleh ruang dan waktu, terus mengalami pergerakan dan perubahan. Ilmu pengetahuan merupakan konstruksi dari akal budi manusia yang bersifat historis, oleh karenanya, maka perubahan atau dinamika perkembangan adalah sesuatu yang sangat alamiah seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena basis operasional pendidikan adalah ilmu pengetahuan, maka segala dinamika perkembangan ilmu pengetahuan juga berimplikasi pada perubahan-perubahan pada lembaga penyelenggara pendidikan.

---

<sup>16</sup> Ibrahim Musa, *Korporasi Produksi Pendidikan, suatu paradigm otonomi dan reformasi dalam Manajemen corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*, editor Buchori Alma (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 140.

<sup>17</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 102.

Tuntutan ini sesungguhnya tidak saja dialami oleh lembaga pendidikan tetapi juga semua lembaga apapun jenisnya, baik lembaga keagamaan, negara maupun kemasyarakatan, tidak ada yang luput dari pengaruh dinamika kehidupan ini. Pendidikan adalah sebuah proses yang berlangsung dalam konteks sosial tertentu yang dinamis. Oleh karenanya maka pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan itu sendiri. Pendidikan senantiasa berfungsi di dalam dan terhadap sistem sosial dimana lembaga pendidikan itu berada<sup>18</sup>. Bahkan, kelestarian lembaga-lembaga itu, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan irama dan dinamika perubahan sosial tersebut.

Lembaga pendidikan Islam juga tidak luput dari “hukum” dan tuntutan perubahan tersebut. Terlebih ketika dunia pendidikan memasuki era globalisasi seperti saat ini, maka lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan<sup>19</sup> dan yang semakin keras yang menuntut kemampuan dan kemauan untuk menjawabnya. Jika lembaga pendidikan Islam mampu merespon irama perubahan -melalui inovasi-inovasi cerdas dan kreatifnya- maka peluang untuk “*survive*” akan sangat besar, namun jika lembaga pendidikan Islam tidak mampu atau lamban merespon dinamika perubahan, maka cepat atau lambat lembaga pendidikan Islam akan tertinggal dan otomatis ditinggalkan masyarakat.

---

<sup>18</sup> Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 21.

<sup>19</sup> Mastuhu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh system pendidikan nasional dalam memasuki abad 21 yang mengharuskan dunia pendidikan melakukan reposisi, serta strategi-strategi perubahan, antara lain; tantangan eksternal; globalisasi, kompleksitas, turbulence, dinamika, akselerasi, keberlanjutan dari yang kuno ke yang modern, konektifitas, konvergensi, konsolidasi, rasionalisasi, paradox global dan kekuatan pemikiran, Baca Mastuhu, *Menata ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, Yogyakarta, Safiria Insania press, 2003, 9-31. Sementara Robbin, mengidentifikasi beberapa factor yang menstimulasi terjadinya perubahan dalam konteks organisasi secara umum, yakni; sifat angkatan kerja yang berubah, teknologi, kejutan-kejutan ekonomi, tren social yang berubah, politik dunia baru dan sifat persaingan yang berubah, Lihat dalam Winardi, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 6.

## **B. Strategi Menentukan Fungsi Kelembagaan Pendidikan Islam.**

### **1. Misi Akademik dan Misi Keagamaan**

Paling tidak ada dua beban misi yang harus dipikul atau diemban oleh lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi Islam (Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas), yaitu *misi akademik* dan *misi keagamaan*. Dua misi tersebut terkadang memiliki karakter yang berhadapan bahkan berbenturan sehingga tidak mudah bagi perguruan tinggi agama Islam untuk menentukan salah satu misi saja guna menghindari kasus tabrakan itu. Keduanya sangat penting karena menjadi alasan historis berdirinya perguruan tinggi. Di satu sisi, menurut Mujamil Qmar; IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Universitas Islam Negeri (UIN), dan PTKIS harus memikul tanggung jawab *akademis* seperti perguruan tinggi perguruan tinggi pada umumnya, yaitu sebagai pusat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, agen perubahan (*agent of change*), dan agen pembaruan (*agent of modernization*). Di sisi lain, IAIN, STAIN, UIN, dan PTKIS juga harus memikul tanggung jawab *dakwah* dalam menyebarkan dan mengembangkan misi ajaran-ajaran Islam, baik dikalangan internal civitas akademik, maupun di kalangan eksternal di luar kampus, yaitu kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, menurut Mujamil Qomar; beban perguruan tinggi agama Islam menjadi ganda, yaitu *beban akademis* dan *beban dakwah*. Dua beban perguruan tinggi tersebut menurut Mujamil Qomar memiliki sifat yang berbeda, yaitu:

- a. beban akademis (keilmuan) membutuhkan pendekatan kritis, analitis, empiris, dan historis. Lembaga akademis (keilmuan) membiasakana sikap terbuka (*inkusif*) terhadap masukan-masukan maupun kritik.
- b. beban dakwah (keagamaan) menuntut sikap pemihakan, idealism, bahkan sering kali diwarnai dengan pembelaan yang bercorak apologis. Lembaga dakwah (keagamaan) bersikap lebih tertutup (*eksklusif*) terhadap kritikan-kritikan dari luar, karena lebih mengedepankan pendekatan normatif-doktrinal.

Dalam praktinya, kendati karakter keduanya dapat dipilah-pilah, tetapi para dosen dan mahasiswa masih sulit membedakan secara proposional. Menurut Mujamil Qomar, meminjam pendapatnya Abdulla,

bahwa kinerja *Islamic Studies (dirasat Islamiyah)* di IAIN dan PTKIS agaknya masih lebih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantis, apologis, sehingga kadar muatan analitis, kritis, metodologis, historis-empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah keagamaan produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu yang jumlahnya masih sangat terbatas.<sup>20</sup> Hal ini menjadi problem yang cukup serius dan sangat dilematis dalam menjembatani misi akademis (keilmuan) dengan misi dakwah (keagamaan). Upaya untuk mempertahankan keduanya mungkin bisa, tetapi untuk meninggalkan salah satunya akan terasa berat sekali. Dalam kapasitasnya sebagai perguruan tinggi, IAIN dan PTKIS maupun sekarang berkembang lagi menjadi STAIN dan UIN, tentu sangat berat bahkan hampir tidak mungkin meninggalkan misi akademis (keilmuan), sebab identitas perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan penelitian, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, agen perubahan (*agent of change*), dan agen pembaruan (*agent of modernization*) akan hilang. Jika PTKI meninggalkan misi akademis (keilmuan), maka PTKI akan mengalami kemandekan, stagnasi, dan kebekuan. Kondisi ini jelas yang akan dihindari.

Demikian pula jika PTKI meninggalkan misi dakwah (keagamaan), maka itu sama saja mengingkari motif pendiriannya sebagai lembaga dakwah ajaran Islam yang jangkauannya luas. Jika ada upaya meninggalkan misi dakwah (keagamaan), maka hal itu sama artinya memotong akar sejarahnya sendiri, tentu hal ini tidak mungkin. Mujamil Qomar, meminjam pendapatnya Abdul Munir Mul Khan menegaskan bahwa problem metodologis pemikiran Islam dan khususnya pendidikan Islam yaitu terletak antara pilihan ideologis dan ilmiah tersebut selama ini tidak pernah benar-benar diselesaikan dengan tuntas.<sup>21</sup> Di satu sisi, misi tersebut jelas sama-sama berat untuk dilepas.

---

<sup>20</sup> A. Amin Abdullah, *Studi Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 104-105.

<sup>21</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Yogyakarta: Siplees, 1993), hlm. 203.



Namun di sisi lain, dua misi tersebut kerap kali bertabrakan pada tataran implementasinya. Mujamil Qomar berpendapat, yang perlu dipikirkan sekarang secara serius saat ini adalah bagaimana perguruan tinggi agama Islam dapat memetakan dua misi tersebut sehingga tidak mengorbankan identitas dan akar historisnya. Perguruan tinggi agama Islam harus mampu menciptakan jembatan yang menghubungkan kedua misi tersebut. Mujamil Qomar mengatakan, paling tidak terdapat tiga pilihan untuk memecahkan masalah ini:

- a. PTKI harus senantiasa memantapkan misi akademis (keilmuan) dan tetap membongkang misi dakwah (keagamaan). Dengan kata lain, perguruan tinggi agama Islam harus menekankan misi akademis dan juga melestarikan misi dakwah. Konsekuensinya, PTKI harus berusaha melaju secepat mungkin dalam mengembangkan penelitian, ilmu pengetahuan, perubahan, dan penerapan dengan menggunakan pendekatan kritis, analitis, empiris, historis, dan metodologis dalam memahami teks-teks wahyu baik al-Qur'an, hadits, maupun kitab-kitab keagamaan yang klasik seperti kitab tafsir, syarah hadits, aqidah, kalam, fiqh, ushul fiqh, akhlak, tasawuf, maupun sejarah Islam. Di saat yang bersamaan, PTKI juga tetap menjalankan dakwah kepada masyarakat. Pertemuan antara keduanya (akademik dan dakwah) jelas akan menimbulkan benturan. Namun benturan tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai cara, misalnya: kalau dalam misi dakwah terdapat sikap pemihakan, maka pemihakan tersebut harus memiliki dukungan pemikiran rasional dan data-data empiris, kecuali pada pemahaman yang masuk wilayah suprasional (jauh dari jangkauan akal) atau supraempiris (jauh dari jangkauan indra).
- b. PTKI melakukan pengembangan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, perubahan, penerapan, dan sebagainya dengan semangat akademis, sedangkan dalam mengamalkan hasil-hasil keilmuan yang telah dimiliki dan dicapai dengan menggunakan semangat dakwah. Semangat akademis direfleksikan dalam kegiatan-kegiatan membaca, menulis, menelaah, melakukan eksperimen, menggali, meneliti, menemukan, mengembangkan, merumuskan konsep, merumuskan kaidah-kaidah, merumuskan teori-teori,

meracik strategi, menerapkan teori, dan sebagainya. Sementara itu, semangat dakwah dimulai dengan mengamalkan sabda Nabi, “*Ballighu ‘anniy walau ayah.*” (sampaikanlah dariku walaupun satu ayat). Berdasarkan Hadits ini, semangat dakwah harus dikobarkan dengan cara mengomunikasikan hasil-hasil dari kerja ilmu tersebut kepada masyarakat dalam kerangka *al-amr bi al-ma’ruf wa an-Nahy ‘an al-munkar* (memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran). *Al-Amr bi al-ma’ruf* dapat di ekspresikan dengan menganjurkan peningkatan iman, taqwa, ibadah, dan akhlak serta anjuran menuntut ilmu, menyumbangkan keahlian, dan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan *an-nahy ‘an al-munkar* dapat di ekspresikan dengan cara melarang perbuatan: syirik, kejahatan, sikap merugikan orang lain, meninggalkan ibadah, bermalas malasan, malas mencari ilmu, malas melakukan uji coba, malas meneliti, dan tindakan-tindakan kontraproduksi lainnya. Implementasi dari sikap semangat akademis itu mengantarkan posisi PTKI mencapai martabat sebagai pusat pengembangan ilmu, dan implementasi dari semangat dakwah itu menyebabkan PTKI memiliki watak populis, yakni memiliki kepedulian yang tinggi dalam membaur dengan masyarakat dan sekaligus memberdayakan mereka, sehingga dapat menepis kesan selama ini bahwa PTKI seperti menara gading, elitis, dan tertutup.

- c. PTKI berusaha mengembangkan dakwah (keagamaan) dengan menggunakan pola-pola keilmuan. Hal ini dapat di ekspresikan dengan cara mengembangkan manajemen dakwah kepemimpinan dakwah, metode dakwah, pendekatan dakwah, dakwah dengan lisan (*da’wah bi al-lisan*), dakwah dengan perbuatan (*da’wah bi al-hal*), dakwah dengan tulisan (*da’wah bi al-kitabah*) dan dakwah melalui hiburan (*da’wah bi at-tasliyah*). Bahkan yang lebih penting dalam konteks PTKI adalah ajaran-ajaran Islam di dalam al-Qur’an dan Hadits sebagai materi dakwah itu di teropong, digali, ditelaah, dan di bahas secara multi perspektif keilmuan, baik dari sisi ekonomi, psikologis, sosiologis, sejarah, hukum, politik, pedagogi, antropologi, astronomi, kesehatan, kedokteran, dan sebagainya, sehingga terdapat

pengembangan konsep, gagasan, teori, strategi, dan sebagainya yang dapat memperkaya peradaban Islam.

Tiga pilihan tersebut dirasa cukup relevan bagi PTKI karena memilih yang mana saja diantara tiga pilihan itu akan tetap mengedepankan pengembangan ilmu sebagai karakter perguruan tinggi dan memproteksi dakwah. Terlebih telah terjadi pergeseran kecenderungan penelitian mahasiswa yang mengarah kepada pengembangan ilmu. Azra melaporkan, dalam dasawarsa awal IAIN, kajian-kajian tentang ilmu ditempat ini memiliki empat kecenderungan pokok: (1) bersifat normatif-idealistik; (2) orientasi pada sektorialisme mazhab, khususnya mazhab fikih Syafi'i dan kalam Asy'ari; (3) kiblat keilmuannya ke Timur Tengah; dan (4) terpencil dari wacana keilmuan yang lebih luas.<sup>6</sup> Kemudian terjadi perubahan kecenderungan mulai sekitar 1980-an, yaitu: (1) kajian-kajian tentang Islam di IAIN pada umumnya bersifat non mazhab atau menggunakan pendekatan non mazhabi; (2) terjadinya pergeseran dari kajian-kajian Islam yang lebih bersifat normatif ke arah yang lebih bersifat historis, sosiologis, dan empiris; dan (3) orientasi keilmuan yang lebih luas dan beragam sehingga mulai memunculkan model pendekatan Barat pada Islam.

Bagi perguruan tinggi agama Islam, misi atau beban akademis (keilmuan) menjadi sesuatu yang niscaya (tidak boleh tidak) karena merupakan jiwa atau roh suatu perguruan tinggi. Kecenderungan pada misi akademis (keilmuan) ini sebenarnya dapat diturunkan pada lembaga pendidikan Islam di bawahnya seperti Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah maupun jalur sekolah seperti: Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Dasar yang menerapkan sistem madrasah. Hanya saja semakin ke bawah lembaganya, tingkat analitis dan kritisnya semakin sederhana kadarnya disesuaikan dengan masing-masing jenjang pendidikan itu.

Penguatan misi akademis (keilmuan) ini juga dapat mencakup pesantren. Sebenarnya setiap lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu pengetahuan yang berjenjang/bertingkat/bersambung dan/atau didukung literatur, baik kitab maupun buku yang bertingkat

layak menekankan misi akademis (keilmuan), seperti pesantren, kendati misi dakwah (keagamaan) masih mewarnai kehidupan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini. Hanya saja misi akademik ini baru diimplementasikan di beberapa pesantren seperti pesantren modern Gontor, pesantren Lirboyo, dan pesantren Sidogiri.

Lembaga pendidikan Islam yang ingin mencapai kemajuan yang dinamis seharusnya menekankan misi dan fungsi akademisnya. Lembaga-lembaga akademik dituntut senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak boleh mandek pada suatu pemahaman atau pemikiran, apalagi jika keduanya disakralkan. Lembaga-lembaga akademik dituntut untuk senantiasa mengembangkan pemikiran, pemahaman, gagasan, ide, konsep, wawasan, teori, dan strategi sehingga selalu mengalami perubahan dan pembaruan progresif yang bersifat positif-konstruktif, yang mengandung muatan nilai-nilai makin efektif dan efisien. Karena itu, lembaga-lembaga akademik (keilmuan) sangat menghargai inisiatif, pemikiran kritis, analitis, kreatifitas, dan produktifitas, karena ini semua yang mampu mengawal kemajuan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari peradaban.

Ada pun misi dakwah (keagamaan) di PTKI dan lembaga pendidikan Islam lainnya (MA/SMU/SMK, SMP/MTs, SD/MI, dan pesantren) juga tetap dapat memproteksi dan melestarikan misi tersebut. Misi dakwah juga dapat dikembangkan dan dijalankan secara leluasa melalui pengajian-pengajian dimasyarakat.

## 2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing.

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Untuk itu didalam konsep ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan yang pantas untuk karakter anak indonesia yakni “Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing” supaya dengan adanya konsep tersebut diharapkan proses pematangan peserta didik dapat berjalan dengan baik. Serta diharapkan para pengelola lembaga pendidikan mampu menjadi lembaga yang berdaya saing.

Untuk membuka tabir yang memarjinalkan pendidikan Islam, maka proses pengembangan lembaga pendidikan Islam harus terus digalakkan. Dalam hal ini, ilmu manajemen sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan mutu. Mengelola lembaga pendidikan Islam berarti melakukan proses penataan kelembagaan pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.<sup>22</sup> Untuk meyakinkan keraguan masyarakat terhadap lulusan dari pengelola dan penyelenggara pendidikan tentunya sekolah harus berbenah menuju perbaikan secara terus menerus sehingga nantinya mampu mewujudkan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

Masrokan dalam jurnal *Efisteme* menjelaskan bahwa manajemen strategik pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mendasar dalam penataan kelembagaan pendidikan yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkannya dan memberikan control secara strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien.<sup>23</sup> Pendidikan bermutu dan berdaya saing adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan yang bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem kelola yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, meliputi:

---

<sup>22</sup> Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. 2, 2014), hlm. 37.

<sup>23</sup> Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam*, *Jurnal Episteme*, Vol 3, No 2, (Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung, 2008), hlm. 154.

- a. Materi pelajaran yang baik dan harus dilakukan guna mencapai tercapainya pendidikan yang bermutu ialah materi pelajaran yang dirasakan manfaatnya oleh peserta didik, baik dirasakan langsung maupun kemudian hari, materi pelajaran tersebut harus memberikan wawasan yang bersifat meningkat secara terus-menerus, materi pelajaran tersebut harus memberikan semangat, motivasi, dan kreativitas berpikir bagi peserta didik.
- b. Perencanaan pendidikan yang baik tidak hanya dimaksudkan untuk menetak dan mempersiapkan masa depan peserta didik agar mereka dapat hidup dengan baik di zamannya, tapi juga mempersiapkan dan membekali mereka ketika manusia mwnghadap tuhannya.
- c. Tata kelola yang baik adalah sistem tata kelola dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bersifat komprehensif atau utuh, artinya pembangunan pendidikan bukan meningkatkan anggara saja tapi juga memperhatikan kualitas guru budaya belajar peserta didik, sarana prasarana belajar, manajemen pendidikan , kebijakan dan program, serta produk dan daya dukung lingkungan. Tata kelola pendidikan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antarfungsi dan peran antar komponen yang satu dengan yang lain. Tata kelola yang baik juga harus bersifat terukur, artinya uang yang diberikan oleh oleh orangtua peserta didik berubah menjadi sikap, pemikiran dan periaku yang bagaimana. Selain itu sistem tata kelola juga harus berkesinambungan, artinya memperhatikan prinsip keseimbangan antara kekuatan satu komponen dengan komponen lainnya.
- d. Pendidikan yang bermutu juga dari guru yang bermutu. Guru yang bermutu paling tidak harus menguasai materi ajar, metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi belajar. Guru yang baik bukan sekadar guru yang pintar, tapi guru yang memintarkan peserta didik. Guru yang baik bukan sekadar guru yang berkarakter, tapi guru yang mampu membentuk karakter yang baik bagi peserta didiknya.
- e. Mengingat guru harus mampu mengembangkan pembelajaran dengan beragamnya latar belakang kemampuan, pemahaman, mengalaman minat, motivasi, gaya, dan kecepatan belajar para peserta didik bisa dengan melakukan strategi pembelajaran yang

efektif misalnya dengan metode mengajar berperan untuk menynergikan beragamnya potensi atau kemampuan, minat karakteristik pengalaman, kebutuhan, kebiasaan, dan gaya belajar peserta didik, bisa juga dengan mengembangkan pola pembelajaran antara lain ketika guru mampu memosisikan peserta didik sebagai manusia yang penting, berharga, dan berkemampuan, guru juga harus mampu menguasai dan menamkan daya pengaruh dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, guru menggunakan variasi model pembelajaran yang menggabungkan sistem pembelajaran yang bersifat klasikal dengan pola belajar individual melalui pola belajar tuntas, selain itu juga perlu pengembangan sistem evaluasi.

Untuk mendukung tercapainya pola penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, pimpinan lembaga pendidikan mesti melakukan langkah-langkah yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberdayakan lembaganya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Para penyelenggara pendidikan setidaknya mampu memberi pupuk secara tepat epada lembaga yang dianggap sehat dan mengobati lembaganya yang dianggap berpenyakit. Untuk mengetahui hal itu, para pimpinan lembaga pendidikan harus melakukan analisis secara tepat. Supaya pimpinan bisa melakukan treatment secara tepat.

Untuk memenangkan persaingan, para penyelenggara pendidikan harus memiliki spirit selalu berada di depan perubahan dengan jaminan bahwa mereka akan sampai lebih dulu digaris finis. Oleh karena itu, para penyelenggara pendidikan setidaknya memiliki sikap kompetitif dalam menjalankan tugas kelebagaanya. Misalnya memiliki komitmen untuk tetap melakukan yang terbaik dan tetap memperjuangkan keunggulan dan titik kesempurnaan, berpegang teguh pada prinsip kejujuran, profesionalisme, dan keterpecaayaan. Memiliki prinsip selalu berada di depan, visioner, cermat, penuh perhitungan, berorientasi pada prinsip-prinsip kebaikan, peka terhadap tuntunan aspirasi

## **Kesimpulan**

1. Fungsi Kelembagaan Pendidikan Islam, meliputi 2 hal, yaitu: (a) Pendidikan, Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan; (b) Pengembangan dan Perubahan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Strategi Menentukan Fungsi Kelembagaan Pendidikan Islam, meliputi 2 hal, yaitu: (a) *Misi Akademik dan Misi Keagamaan*, Beban akademis (keilmuan) membutuhkan pendekatan kritis, analitis, empiris, dan historis. Sedangkan, Beban dakwah (keagamaan) menuntut sikap pemihakan, idealism, bahkan sering kali diwarnai dengan pembelaan yang bercorak apologis; (b) *Peningkatan Mutu dan Daya Saing*, Pendidikan yang bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem kelola yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, meliputi: Materi pelajaran yang baik, Perencanaan pendidikan yang baik, Tata kelola yang baik, guru yang bermutu dan harus mampu mengembangkan pembelajaran.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Amin, *Studi Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas Atau Historisitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakar, Osman, *Tawhid and Science: Islamic Perspectives on Religion and Science*, Terj. Yulianto Liputo dan M.S. Nasrulloh, *Tauhid dan Sains: Perspektif Islam tentang Agama dan Sains*, (Bandung: Pustaka Hidayah, Edisi kedua dan Revisi, 2008).
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Indra, Hasbi, *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*, Jakarta, Rida Mulia, 2005.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMARI) Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Mansyur, Masykur H, *Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam*, Universitas Singaperbangsa Karawang, ISSN: 1412-86676 Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012.
- Mastuhu, *Menata ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, Yogyakarta, Safiria Insania press, 2003,
- Muhaimin, *Model Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam Kontemporer Di Sekolah/Madrasah Dan Perguruan Tinggi*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2016.
- Mujamil, *Dimensi Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Menggagas Pendidikan Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014).
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan Dakwah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Humanisasi Pendidikan Islam dalam Tashwirul Afkar*, No 11, tahun 2000, 11.
- Musa, Ibrahim, *Korporasi Produksi Pendidikan, suatu paradigm otonomi dan reformasi dalam Manajemen corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*, Buchori Alma (adit), Bandung Alfabeta, 2008.
- Mutohar, Prim Masrokan, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, cet.II, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2014).

- \_\_\_\_\_, *Manajemen strategic dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal, Efisteme, Vol 3, No 2, (Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung, 2008).*
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.*
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- Sagala, Syaiful, *Memahami Organisasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, cv, 2008.*
- Toffler, Alfin, *Gelombang Ketiga, alih bahasa Sri Koesdiyantiah, Jakarta: Pantja Simpati, 1980.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.
- UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara bahwa kementerian Agama adalah salah satu kementerian yang bersifat vertikal.
- Winardi, *Manajemen Perubahan, Jakarta, Kencana, 2005.*